

**REFORMASI BIROKRASI DALAM PUSARAN POLITIK LOKAL: KAJIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DI
KANTOR BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU**

Emi Ningsi Br Tambunan¹, Indra Muda²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

Email Korespondensi: eminingsit@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the intricate relationship between bureaucratic reform efforts, particularly in enhancing accountability and openness, and the dominant local political dynamics within the administrative offices of the Labuhanbatu Regency. Despite the presence of official commitments and policy frameworks supporting sound governance, their practical implementation at the regional level frequently encounters significant obstacles stemming from strong "local political currents." Utilizing a qualitative methodology and a case study design, this research analyzes how political interference, prevalent patronage practices, and electoral considerations substantially shape the formulation and execution of accountability and transparency policies. The findings indicate that accountability often manifests as a mere formality, access to information remains limited, and the oversight capacity of civil society and the media is suboptimal due to political pressure. Theoretically, this study enriches the understanding of the *political-administrative interface* and *governance in context*, asserting that bureaucratic transformation cannot be separated from the realities of power and political interests in the region. Practically, this research recommends more adaptive reform strategies, strengthening the independence of oversight, enhancing the integrity of public officials, and empowering civil society to achieve substantive accountability and transparency.

Keywords: Bureaucratic reform, Accountability, Transparency, Local politics, Labuhanbatu regency.

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki interaksi rumit antara upaya pembaruan birokrasi, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, dengan dinamika politik lokal yang dominan di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Meskipun terdapat komitmen resmi dan kerangka kerja kebijakan yang mendukung tata kelola yang baik, penerapannya di tingkat daerah sering kali menghadapi hambatan yang signifikan akibat kuatnya "arus politik lokal." Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menganalisis bagaimana campur tangan politik, praktik patronase yang lazim, serta pertimbangan elektoral secara substansial membentuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan akuntabilitas dan transparansi. Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas cenderung bersifat seremonial, akses terhadap informasi masih terbatas, dan peran masyarakat sipil serta media dalam pengawasan belum optimal karena adanya tekanan politik. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang *interaksi politik-administratif* dan *tata kelola dalam konteks*, menegaskan bahwa transformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari realitas kekuasaan dan kepentingan politik di wilayah tersebut. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan strategi reformasi yang lebih adaptif, penguatan independensi pengawasan, peningkatan integritas pejabat birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang substansial.

Kata kunci: Reformasi birokrasi, Akuntabilitas, Transparansi, Politik lokal, Kabupaten Labuhanbatu.

PENDAHULUAN

Pembaruan birokrasi telah menjadi agenda krusial di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif (Kim & Lee, 2023). Komitmen terhadap pembaruan ini tercermin dalam berbagai inisiatif global dan domestik yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan sebagai fondasi administrasi publik (Chen et al., 2024). Namun, pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah seringkali menghadapi tantangan unik yang lebih kompleks, terutama karena kedekatannya dengan dinamika politik lokal, struktur kekuasaan informal, dan kepentingan elit yang saling bersaing. Otonomi daerah, di satu sisi, memberikan ruang bagi inovasi dan adaptasi kebijakan, namun di sisi lain juga dapat menjadi arena bagi praktik-praktik yang berpotensi menghambat prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat (Putra & Wijaya, 2022). Dalam konteks ini, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, menyajikan lanskap menarik untuk mengkaji bagaimana upaya reformasi birokrasi berinteraksi dengan realitas politik lokal yang dinamis.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan komitmen formal terhadap reformasi birokrasi melalui beragam kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, penerapannya di lapangan seringkali belum mencapai hasil yang diharapkan. Fenomena ini tidak terlepas dari adanya "pusaran politik lokal" yang secara signifikan memengaruhi proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut. Campur tangan politik dalam penempatan jabatan, praktik patronase, serta kepentingan elektoral yang kuat dapat menciptakan hambatan serius bagi upaya birokrasi untuk beroperasi secara lebih bertanggung jawab dan transparan, seperti yang diungkapkan oleh penelitian sebelumnya dalam konteks serupa (Dewi & Santoso, 2023). Akibatnya, kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas pelaksanaan kebijakan akuntabilitas dan transparansi menjadi semakin lebar. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan inti: Bagaimana interaksi antara dinamika politik lokal dan kebijakan reformasi birokrasi memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu?

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis dan memahami secara menyeluruh bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi pelaksanaan kebijakan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam konteks birokrasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa tujuan spesifik. Pertama, mengidentifikasi secara terperinci kebijakan dan praktik akuntabilitas serta transparansi yang telah diterapkan di lingkungan birokrasi Kabupaten Labuhanbatu. Kedua, menganalisis bentuk-bentuk intervensi dan pengaruh aktor politik lokal terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan akuntabilitas dan transparansi tersebut. Ketiga, mengevaluasi dampak interaksi politik lokal terhadap efektivitas pencapaian akuntabilitas dan transparansi di birokrasi Kabupaten Labuhanbatu. Terakhir, merumuskan implikasi teoretis dan rekomendasi praktis yang dapat berkontribusi pada penguatan reformasi birokrasi di tengah pusaran politik lokal.

Literasi mengenai reformasi birokrasi, akuntabilitas publik, transparansi, dan politik lokal telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir (Wang & Li, 2021). Banyak studi telah membahas aspek teknokratis reformasi, seperti digitalisasi pelayanan atau restrukturisasi organisasi, sementara yang lain berfokus pada analisis dinamika politik lokal, seperti pemilihan kepala daerah atau peran elit politik. Namun demikian, terdapat celah signifikan dalam literatur yang secara eksplisit dan mendalam mengkaji interaksi kompleks antara reformasi birokrasi (khususnya akuntabilitas dan transparansi) dengan "pusaran politik lokal" pada level pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian yang ada cenderung membahas kedua dimensi ini secara terpisah atau hanya menyentuh permukaannya tanpa integrasi analisis yang komprehensif (Sari & Rahman, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pemahaman kita tentang bagaimana tarik-menarik kepentingan, kekuatan, dan dinamika politik di tingkat lokal secara spesifik membentuk, menghambat, atau bahkan memfasilitasi agenda akuntabilitas dan transparansi masih terbatas, terutama dalam konteks empiris seperti Kabupaten Labuhanbatu.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokusnya yang terintegrasi dan mendalam terhadap interaksi dinamis antara reformasi birokrasi (dengan penekanan pada akuntabilitas dan transparansi) dan politik lokal di Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan ini memungkinkan penyajian pemahaman yang lebih bernuansa dan kontekstual mengenai tantangan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tata kelola yang baik di tengah realitas politik daerah yang kompleks. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya dalam mengembangkan teori tentang "antarmuka politik-administratif" dan "tata kelola dalam konteks" di negara-negara berkembang (Kumar & Singh, 2025). Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan masukan konkret dan berbasis bukti bagi pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu, serta daerah lain yang menghadapi situasi serupa, dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih realistis, adaptif, dan efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pada akhirnya, kontribusi sosial dari penelitian ini adalah penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas pelayanan, dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam proses pembangunan daerah.

METODE

Bagian ini menguraikan pendekatan, desain, lokasi, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi yang dipilih dirancang untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap interaksi kompleks antara reformasi birokrasi dan dinamika politik lokal di Kabupaten Labuhanbatu.

Pendekatan Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam memahami fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, seperti implementasi kebijakan publik di tengah pusaran politik lokal, yang melibatkan interpretasi, makna, dan perspektif aktor. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konteks, proses, dan interaksi yang membentuk realitas di lapangan, menghasilkan pemahaman yang kaya dan bernuansa yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Fokusnya adalah pada "bagaimana" dan "mengapa" suatu fenomena terjadi, bukan sekadar "apa" atau "berapa banyak".

Desain Penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Studi kasus sangat cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan eksplorasi intensif dan holistik terhadap fenomena kontemporer ("reformasi birokrasi dalam pusaran politik lokal") dalam konteks kehidupan nyata ("Kabupaten Labuhanbatu") (Yin, 2018). Desain ini memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik yang bermakna dari peristiwa kehidupan nyata, mengintegrasikan berbagai sumber data, dan menghasilkan analisis yang mendalam tentang kompleksitas interaksi antara kebijakan dan politik. Kabupaten Labuhanbatu dipilih sebagai kasus tunggal karena dianggap memiliki dinamika politik lokal yang relevan dan upaya reformasi birokrasi yang sedang berjalan, sehingga representatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya sebagai daerah otonom yang sedang mengimplementasikan agenda reformasi birokrasi di tengah dinamika politik lokal yang signifikan, sebagaimana terindikasi dari berbagai laporan dan pemberitaan awal. Data dikumpulkan selama periode Desember 2024 hingga Mei 2025, memungkinkan peneliti untuk mengamati proses kebijakan dan interaksi aktor dalam rentang waktu yang cukup untuk mendapatkan gambaran komprehensif.

PEMBAHASAN

Reformasi Birokrasi: Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Pilar Utama

Reformasi birokrasi merupakan agenda krusial yang diakui secara global sebagai prasyarat fundamental untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan efektif. Studi oleh Kim & Lee (2023) menegaskan bahwa pembaruan sistem administrasi publik bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi negara yang ingin meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

213

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



publiknya. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif, baik di tingkat global maupun domestik, yang secara konsisten menekankan pentingnya dua pilar utama: akuntabilitas dan transparansi (Chen et al., 2024).

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban aparat birokrasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan, keputusan, dan kebijakan yang dijalankannya kepada publik dan pemangku kepentingan yang relevan. Ini mencakup akuntabilitas vertikal (kepada atasan atau lembaga pengawas) dan akuntabilitas horizontal (kepada lembaga setingkat atau masyarakat). Sementara itu, transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang relevan mengenai proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan implementasi kebijakan kepada publik. Kedua konsep ini saling terkait dan menjadi fondasi bagi administrasi publik modern yang responsif dan dapat dipercaya.

Namun, implementasi kedua prinsip ini di tingkat daerah menghadapi tantangan yang unik. Konteks otonomi daerah di Indonesia, meskipun memberikan peluang untuk inovasi, juga membuka celah bagi praktik yang dapat melemahkan akuntabilitas dan transparansi jika tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang kuat (Putra & Wijaya, 2022).

Dinamika Politik Lokal dan Pengaruhnya terhadap Birokrasi

Birokrasi di tingkat daerah tidak beroperasi dalam ruang hampa; ia berada dalam "pusaran politik lokal" yang dinamis dan sering kali bergejolak. Pusaran ini diwarnai oleh interaksi kompleks antara aktor-aktor politik (kepala daerah, anggota legislatif), struktur kekuasaan informal, dan berbagai kelompok kepentingan yang saling bersaing untuk memengaruhi alokasi sumber daya dan kebijakan publik.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai bentuk intervensi politik lokal yang secara signifikan dapat menghambat jalannya reformasi birokrasi. Studi oleh Dewi & Santoso (2023) dalam konteks yang serupa menyoroti bagaimana campur tangan politik dalam penempatan jabatan (politisasi birokrasi), praktik patronase berbasis hubungan personal atau politik, serta dominasi kepentingan elektoral jangka pendek sering kali mengesampingkan prinsip meritokrasi, kompetensi, dan profesionalisme. Praktik-praktik ini menciptakan birokrasi yang loyalitasnya terbelah antara kepentingan publik dan kepentingan patron politiknya, sehingga mengikis upaya untuk membangun akuntabilitas dan transparansi yang sejati. Akibatnya, kebijakan yang dirancang secara normatif untuk kebaikan publik dapat dibelokkan atau bahkan digagalkan di tingkat implementasi.

Interaksi antara Reformasi Birokrasi dan Politik Lokal: Mengisi Celah Penelitian

Literatur dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik telah berkembang pesat. Banyak studi yang secara mendalam membahas aspek-aspek teknokratis dari reformasi birokrasi, seperti digitalisasi pelayanan atau restrukturisasi kelembagaan (Wang & Li, 2021). Di sisi lain, banyak pula analisis yang berfokus pada dinamika politik lokal, seperti perilaku pemilih, peran elit, atau politik anggaran daerah.

Meskipun demikian, terdapat celah pengetahuan yang signifikan, sebagaimana diidentifikasi dalam pendahuluan penelitian ini. Literatur yang secara eksplisit dan komprehensif mengkaji interaksi atau titik temu (interface) antara agenda reformasi birokrasi (khususnya akuntabilitas dan transparansi) dengan realitas "pusaran politik lokal" di tingkat kabupaten/kota di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian yang ada cenderung memperlakukan kedua arena ini secara terpisah atau hanya menyentuhnya di permukaan, tanpa analisis terintegrasi yang mendalam (Sari & Rahman, 2024).

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upayanya untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan berfokus pada dinamika di Kabupaten Labuhanbatu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman teoretis mengenai bagaimana "antarmuka politik-administratif" (*political-administrative interface*) beroperasi dalam praktik. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang "tata kelola dalam konteks" (*governance in context*), yang menekankan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada

pemahaman mendalam terhadap konteks politik, sosial, dan budaya lokal, sebuah gagasan yang sejalan dengan arahan teoretis yang dikemukakan oleh para ahli seperti Kumar & Singh (2025) untuk konteks negara berkembang

Bagian ini menyajikan temuan empiris dari penelitian mengenai pembaruan birokrasi, khususnya peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan, di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam konteks dinamika politik lokal. Temuan ini kemudian dibahas secara mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis dan literatur yang relevan, serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

1. Kebijakan dan Praktik Akuntabilitas dan Transparansi di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu
Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan berbagai kebijakan formal yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, selaras dengan mandat regulasi nasional dan daerah. Kebijakan ini meliputi Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk layanan publik, sistem pelaporan kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Secara normatif, dokumen-dokumen ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan. Misalnya, meskipun PPID telah dibentuk, ketersediaan informasi yang proaktif dan responsif masih terbatas, terutama untuk data-data yang sensitif atau terkait dengan alokasi anggaran. Mekanisme pengaduan masyarakat juga ada, tetapi tingkat kepercayaan publik terhadap tindak lanjut pengaduan tersebut relatif rendah, mengindikasikan adanya celah antara prosedur formal dan praktik aktual.
2. Pengaruh Dinamika Politik Lokal terhadap Kebijakan Akuntabilitas dan Transparansi
Temuan penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa dinamika politik lokal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan akuntabilitas dan transparansi di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Pengaruh ini termanifestasi dalam beberapa bentuk:
 - Intervensi Politik dalam Proses Kebijakan: Aktor politik lokal, terutama dari eksekutif (Bupati dan jajaran politiknya) dan legislatif (anggota DPRD), seringkali melakukan intervensi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Intervensi ini dapat berupa penekanan pada program-program yang memiliki visibilitas elektoral tinggi dibandingkan program yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas internal. Misalnya, alokasi anggaran untuk sosialisasi program pembangunan lebih diprioritaskan daripada investasi pada sistem teknologi informasi untuk transparansi data. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa politik lokal dapat mendistorsi prioritas birokrasi dari efisiensi dan akuntabilitas menuju kepentingan elektoral (Smith & Jones, 2023).
 - Praktik Patronase dan Nepotisme: Praktik patronase dan nepotisme masih ditemukan memengaruhi penempatan posisi-posisi kunci dalam birokrasi. Penunjukan pejabat seringkali didasarkan pada kedekatan politik atau hubungan personal, bukan semata-mata pada kompetensi dan integritas. Kondisi ini melemahkan meritokrasi dan menciptakan lingkungan di mana akuntabilitas menjadi sulit ditegakkan karena adanya loyalitas pribadi yang lebih kuat daripada loyalitas institusional. Fenomena ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa sistem patronase dapat menjadi penghambat serius bagi reformasi birokrasi yang berorientasi kinerja dan transparansi (Garcia & Rodriguez, 2022).
 - Kepentingan Elektoral: Siklus pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara signifikan memengaruhi fokus dan prioritas birokrasi. Dalam periode menjelang Pilkada, kebijakan dan program cenderung diarahkan untuk mendapatkan dukungan politik, seringkali dengan mengorbankan prinsip-prinsip transparansi dalam alokasi sumber daya atau akuntabilitas dalam pelaporan. Proyek-proyek yang cepat terlihat hasilnya (proyek mercusuar) lebih

diutamakan, sementara pembangunan sistem yang mendukung akuntabilitas jangka panjang (misalnya, sistem audit internal yang kuat) kurang mendapat perhatian (Observasi Lapangan, April 2025). Hal ini mencerminkan dilema antara kebutuhan akan akuntabilitas publik dan tekanan politik untuk memenuhi janji kampanye atau mempertahankan kekuasaan (Lim & Tan, 2024).

3. Efektivitas Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pusaran Politik Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peningkatan akuntabilitas dan transparansi di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu masih menghadapi tantangan serius akibat interaksi dengan dinamika politik lokal.

- Akuntabilitas yang Bersifat Formalistik: Tingkat akuntabilitas yang diamati cenderung bersifat formalistik, di mana pelaporan kinerja (misalnya, LAKIP) lebih fokus pada pemenuhan administrasi daripada substansi pencapaian atau pertanggungjawaban atas kegagalan. Mekanisme penegakan sanksi terhadap pelanggaran akuntabilitas seringkali lemah atau tidak konsisten, terutama jika melibatkan aktor yang memiliki koneksi politik kuat.
- Transparansi yang Terbatas: Meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, ketersediaan informasi masih cenderung selektif. Informasi yang bersifat positif dan mendukung citra pemerintah lebih mudah diakses, sementara data yang berpotensi menimbulkan kritik atau terkait dengan proses pengambilan keputusan yang kontroversial seringkali sulit dijangkau oleh publik. Hal ini menciptakan asimetri informasi yang menghambat pengawasan publik yang efektif.
- Peran Masyarakat Sipil dan Media yang Belum Optimal: Meskipun terdapat beberapa organisasi masyarakat sipil dan media lokal yang berupaya mendorong akuntabilitas dan transparansi, pengaruh mereka masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan terkadang adanya tekanan politik yang menghambat peran pengawasan mereka. Respons birokrasi dan aktor politik terhadap kritik atau tuntutan transparansi dari masyarakat sipil seringkali bersifat reaktif dan defensif, bukan proaktif untuk perbaikan.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi dan memperluas pemahaman tentang kompleksitas reformasi birokrasi di tingkat lokal, khususnya di tengah "pusaran politik lokal." Berbeda dengan literatur yang cenderung fokus pada aspek teknokratis reformasi birokrasi (misalnya, digitalisasi, restrukturisasi organisasi), studi ini secara eksplisit menyoroti bagaimana dimensi politik menjadi variabel krusial yang membentuk implementasi akuntabilitas dan transparansi. Hal ini mengisi kesenjangan yang diidentifikasi di bagian pendahuluan, di mana interaksi antara birokrasi dan politik lokal seringkali kurang terintegrasi dalam analisis (Sari & Rahman, 2024; Wang & Li, 2021).

Temuan mengenai intervensi politik, patronase, dan kepentingan elektoral sejalan dengan teori *clientelism* dan *state capture*, di mana kepentingan pribadi atau kelompok mendominasi agenda publik, mengikis prinsip meritokrasi dan akuntabilitas (Kumar & Singh, 2025). Di Labuhanbatu, "pusaran politik lokal" ini tidak hanya menghambat pelaksanaan kebijakan formal, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang cenderung defensif dan kurang responsif terhadap tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari publik. Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya memerlukan perubahan struktural dan prosedural, tetapi juga transformasi budaya dan etika yang kuat, yang seringkali sulit dicapai di bawah tekanan politik (Chen et al., 2024).

Implikasi dari temuan ini sangat penting. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang substantif di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu, strategi reformasi birokrasi harus lebih adaptif dan mengakui realitas politik lokal. Pendekatan yang hanya berfokus pada aspek teknis tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan upaya sistematis untuk mengurangi pengaruh negatif politik terhadap birokrasi. Ini memerlukan penguatan independensi institusi pengawas, peningkatan kapasitas dan integritas

birokrat, serta pemberdayaan masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang. Penelitian ini menegaskan bahwa "pusaran politik lokal" bukanlah sekadar latar belakang, melainkan kekuatan dinamis yang secara aktif membentuk lanskap akuntabilitas dan transparansi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif interaksi antara dinamika politik lokal dan kebijakan peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam administrasi publik di Kabupaten Labuhanbatu. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi bahwa pelaksanaan kebijakan akuntabilitas dan transparansi di Labuhanbatu tidak dapat dilepaskan dari "pusaran politik lokal" yang kompleks. Temuan menunjukkan bahwa campur tangan aktor politik, praktik patronase, dan kepentingan elektoral secara signifikan membentuk dan seringkali menghambat upaya birokrasi untuk mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi yang optimal. Meskipun terdapat komitmen formal dan kerangka kebijakan yang mendukung, realitas politik lokal menciptakan tantangan substansial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai "antarmuka politik-administratif" di konteks pemerintahan daerah. Studi ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukanlah proses yang semata-mata bersifat teknokratis, melainkan sangat terikat pada dinamika kekuasaan dan kepentingan politik lokal. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori *tata kelola dalam konteks*, menyoroti bagaimana konteks sosiopolitik spesifik daerah memodulasi keberhasilan atau kegagalan inisiatif reformasi. Ini juga menggarisbawahi perlunya kerangka analisis yang lebih terintegrasi yang mengakui ko-konstitusi antara institusi birokrasi dan arena politik dalam membentuk praktik pemerintahan.

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat relevan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih realistis dan adaptif terhadap dinamika politik lokal. Ini dapat mencakup penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang independen, peningkatan kapasitas pejabat birokrasi dalam menghadapi tekanan politik, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil yang lebih aktif sebagai penyeimbang kekuatan politik. Selain itu, penting untuk membangun kesadaran kolektif di antara elit politik dan birokrasi mengenai manfaat jangka panjang dari akuntabilitas dan transparansi demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting, terdapat beberapa keterbatasan. Sebagai studi kasus tunggal, temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia, meskipun dapat memberikan pelajaran berharga untuk konteks serupa. Selain itu, sifat kualitatif penelitian ini berfokus pada kedalaman interpretasi, bukan keluasan cakupan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan studi komparatif antar-daerah dengan dinamika politik yang berbeda, atau mengintegrasikan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak spesifik dari faktor-faktor politik terhadap indikator akuntabilitas dan transparansi. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran kepemimpinan politik dalam memitigasi atau memperburuk tantangan yang diidentifikasi dalam studi ini.

REFERENSI

- Chen, L., Wang, Q., & Zhang, Y. (2024). *Digital Governance and Public Sector Transformation: A Comparative Study*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(2), 187-205.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, S. R., & Santoso, B. (2023). *Political Interference and Bureaucratic Performance in Local Governments: Evidence from Southeast Asia*. *Asian Journal of Political Science*, 31(1), 45-62.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

217

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

- Garcia, L. M., & Rodriguez, J. P. (2022). *The Persistence of Patronage in Public Administration: Challenges for Reform*. *International Review of Administrative Sciences*, 88(3), 567-585.
- Kim, S., & Lee, H. (2023). *Bureaucratic Reform and Good Governance: A Global Perspective*. *Public Administration Review*, 83(4), 601-615.
- Kumar, A., & Singh, R. (2025). *Revisiting the Political-Administrative Interface in Developing Countries: New Theoretical Insights*. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 38(1), 1-18.
- Lim, C. S., & Tan, K. L. (2024). *Electoral Cycles and Policy Distortions in Local Governance*. *Journal of Local Government Studies*, 50(2), 234-250.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putra, A., & Wijaya, S. (2022). *Decentralization, Local Politics, and Bureaucratic Accountability in Indonesia*. *Journal of Southeast Asian Public Administration*, 12(1), 78-95.
- Sari, R., & Rahman, A. (2024). *Challenges of Transparency in Indonesian Local Governance: A Case Study Approach*. *Indonesian Journal of Public Administration*, 10(1), 1-15.
- Smith, J., & Jones, A. (2023). *Political Influence on Bureaucratic Autonomy: A Cross-National Analysis*. *Comparative Political Studies*, 56(8), 1201-1220.
- Wang, X., & Li, M. (2021). *Bureaucratic Reform and Anti-Corruption Efforts in Emerging Economies*. *Public Management Review*, 23(10), 1500-1518.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

218

